

Diferensiasi Agraria Dan Kerja Upahan Pada Perkebunan Sawit Di Desa Celuak Kabupaten Bangka Tengah

¹Eci Mareta, ²Aisyah Putri Salsabila, ³Risky Ananda Putri

^{1,2,3} Prodi Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
e-mail: ecimaretaeci@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis diferensiasi agraria dan kerja upahan dalam perkembangan perkebunan sawit di Desa Celuak, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Sawit tidak ditempatkan sebagai komoditas pertanian semata, tetapi sebagai sistem produksi yang mengatur akses warga terhadap lahan, modal, program pemerintah, pasar, dan kesempatan kerja. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan sawit didorong oleh persepsi pendapatan yang lebih rutin, dukungan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), kemitraan kelembagaan, serta melemahnya daya tarik lada akibat biaya produksi dan fluktuasi harga. Namun, keuntungan sawit tidak terdistribusi secara setara. Warga yang memiliki lahan memperoleh akses terhadap hasil Tandan Buah Segar (TBS), bantuan program, dan jaringan pemasaran, sedangkan warga tanpa lahan lebih banyak terlibat sebagai buruh harian dalam pembersihan lahan, pemupukan, pemanenan, pengangkutan TBS, dan perawatan kebun. Perbedaan tersebut menunjukkan terbentuknya diferensiasi agraria berbasis kepemilikan lahan dan akses kelembagaan. Temuan utama artikel ini menegaskan bahwa sawit di Desa Celuak menciptakan peluang ekonomi sekaligus memperdalam ketimpangan pedesaan karena sebagian warga mengakses nilai produksi melalui aset, sedangkan sebagian lain hanya melalui penjualan tenaga kerja.

Kata Kunci: Diferensiasi Agraria, Sawit, Politik Ekonomi Agraria.

Abstract

This study analyses the differentiation of agrarian relations and wage labour in the development of oil palm plantations in Celuak Village, Simpangkatis District, Bangka Central Regency. Kelapa sawit tidak dipandang sebagai komoditas pertanian semata, melainkan sebagai sebuah sistem produksi yang mengendalikan akses warga terhadap lahan, modal, program pemerintah, pasar, dan kesempatan kerja. The study used a descriptive qualitative method involving interviews, field observations, and literature reviews. The results of the study show that the expansion of palm oil is driven by the perception of more regular income, support from the Programme for the Rejuvenation of Palm Oil (PSR), institutional partnerships, and the weakening of the appeal of pepper due to production costs and price

fluctuations. However, palm oil profits are not distributed equally. Those who own land have access to the fruits of the Tandan Buah Segar (TBS), programme assistance and marketing networks, while those without land are more likely to be employed as daily labourers in land clearing, fertilising, harvesting, transporting TBS and caring for the garden. These differences demonstrate the formation of agrarian differentiation based on land ownership and institutional access. The main finding of this article is that palm oil in Celuak Village creates economic opportunities while deepening rural inequality, as some residents access production value through assets, while others only through selling their labour.

Keywords: Agrarian Differentiation, Palm Oil, Agrarian Political Economy.

LATAR BELAKANG

Desa Celuak, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah, merupakan ruang agraris yang mengalami perubahan orientasi produksi dari komoditas lama menuju sawit. Profil desa yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa Celuak berada dalam lanskap pedesaan yang bergantung pada aktivitas pertanian dan perkebunan (Diskominfo, 2020). Perubahan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai peralihan tanaman. Pergeseran dari lada menuju sawit mengubah basis pendapatan rumah tangga, pola kerja kebun, relasi antarwarga, serta cara negara dan pasar masuk ke dalam struktur ekonomi desa.

Secara historis, lada memiliki posisi penting dalam identitas pertanian Bangka. Kajian Maryadi dan Augusta (2016) menunjukkan bahwa usaha tani lada di Bangka Tengah memiliki nilai ekonomi penting, tetapi juga menghadapi persoalan biaya produksi, produktivitas, dan arahan pengembangan. Beberapa penelitian mutakhir mengenai lada menegaskan bahwa petani menghadapi beban teknis seperti penggunaan junjung hidup, pengolahan pascapanen, kualitas lada putih, dan penentuan harga jual (Kamila et al., 2019; Paramitha et al., 2023; Aulia & Kurniati, 2024). Berita lokal tentang harga lada yang pernah tinggi pada 2015 dan perkembangan harga lada putih pada 2026 memperlihatkan bahwa lada tetap memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dibayangi ketidakpastian pasar (Satriawan, 2015; Septi, 2026). Ketidakpastian tersebut memberi ruang bagi sawit untuk tampil sebagai komoditas yang dipersepsikan lebih stabil. Di Bangka Tengah, dukungan negara terhadap sawit terlihat melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menargetkan peremajaan 150 hektare kebun sawit pada 2023 dan mencatat bahwa sejak 2020 terdapat 479,9 hektare kebun sawit warga yang masuk program PSR (Ahmadi, 2022). Pada Desa Celuak, panen perdana sawit PSR di Simpangkatis dilaporkan terjadi setelah 32 bulan masa tanam, disertai hibah Rp30 juta per petani dari BPDPKS dan dukungan berupa rekomendasi teknis, STDB, jalan produksi, serta pestisida (Rizal, 2023). Fakta tersebut menunjukkan bahwa ekspansi sawit desa tidak berlangsung sebagai keputusan individual petani saja, tetapi terkait dengan kebijakan negara, bantuan kelembagaan, dan jaringan pasar.

Sawit juga seringkali dinarasikan sebagai komoditas yang menguntungkan, penelitian ini menempatkan pertanyaan distribusi sebagai pusat analisis. Literatur politik ekonomi

agraria menekankan bahwa persoalan utama dalam perubahan agraria bukan hanya komoditas apa yang ditanam, melainkan siapa yang memiliki aset, siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh hasil, dan bagaimana hasil tersebut digunakan (Bernstein, 2010). Pertanyaan tersebut penting karena sawit mensyaratkan lahan, modal awal, bibit unggul, pupuk, akses kelompok tani, dokumen administrasi, serta hubungan dengan pembeli TBS. Warga yang memiliki prasyarat tersebut lebih mudah memperoleh manfaat, sedangkan warga tanpa lahan hanya dapat masuk melalui kerja upahan.

Kajian tentang sawit di Indonesia menunjukkan pola yang ambivalen. Di satu sisi, sawit dapat meningkatkan pendapatan, membuka pekerjaan, dan mendorong akses rumah tangga terhadap barang privat tertentu (Krishna & Kubitz, 2021). Di sisi lain, ekspansi sawit dapat meminggirkan warga yang tidak memiliki lahan, memperkuat ketergantungan pada perusahaan atau pemilik kebun, dan mengubah hubungan sosial pedesaan (Li, 2015; Cramb & McCarthy, 2016). Studi di Kalimantan Timur juga menunjukkan bahwa ekspansi sawit mengubah organisasi produksi, struktur pendapatan, dan bentang lanskap pedesaan (Dharmawan et al., 2020). Peneliti kemudian menganalisis permasalahan ini dengan menjelaskan bagaimana sawit membentuk struktur ekonomi agraria di Desa Celuak dan bagaimana posisi warga tanpa lahan dalam sistem kerja upahan sawit. Analisis ini akan menempatkan sawit bukan hanya sebagai peluang ekonomi, tetapi sebagai arena relasi kuasa antara pemilik lahan, buruh kebun, kelompok tani, pemerintah, dan perusahaan. Argumen utama artikel ini adalah bahwa sawit menciptakan diferensiasi agraria karena manfaat utama terkonsentrasi pada warga yang memiliki lahan dan akses kelembagaan, sedangkan warga tanpa lahan memperoleh akses ekonomi melalui tenaga kerja dengan posisi tawar yang lebih lemah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bukan menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan menjelaskan proses sosial yang membentuk diferensiasi agraria dan kerja upahan di Desa Celuak. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti membaca pengalaman warga, posisi aktor, serta makna sosial dari perubahan komoditas pertanian.

Lokasi penelitian adalah Desa Celuak, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Lokasi ini dipilih karena desa tersebut memperlihatkan perkembangan sawit rakyat, keterlibatan kelompok tani, dan dukungan program PSR. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan terhadap aparatur desa, petani sawit, warga yang bekerja di kebun sawit, petani yang masih memiliki pengalaman dengan lada, serta pihak yang terkait dengan kelompok tani. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, artikel berita, dan publikasi yang relevan dengan agraria, sawit, lada, dan pembangunan pertanian Bangka Tengah.

Teknik analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data untuk memilih informasi yang berkaitan dengan sawit, akses lahan, modal, program, kerja upahan, dan relasi antaraktor. Kedua, penyajian data dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema pemilik lahan, warga tanpa lahan, pemerintah, kelompok tani, perusahaan, dan perubahan sosial desa. Ketiga, penarikan kesimpulan dengan membaca pola diferensiasi agraria yang

muncul dari perbedaan akses terhadap aset dan kelembagaan. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan wawancara, observasi, dan literatur. Penggunaan studi literatur mengikuti fungsi literature review sebagai dasar untuk memetakan posisi penelitian, memperjelas konsep, serta menghindari klaim yang tidak terhubung dengan sumber ilmiah (Ridwan et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sawit sebagai Komoditas Dominan dan Rasionalitas Ekonomi Petani

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sawit semakin dipandang sebagai komoditas yang lebih realistis oleh sebagian warga Desa Celuak. Pertimbangan utama warga bukan hanya besarnya hasil, tetapi juga keteraturan panen, kejelasan pembeli, dan dukungan kelembagaan. Persepsi tersebut berbeda dari pengalaman terhadap lada yang dianggap lebih menuntut perawatan, lebih rentan terhadap penyakit, serta memiliki harga yang berubah-ubah. Kajian Kamila et al. (2019) dan Paramitha et al. (2023) menunjukkan bahwa produksi lada putih berkaitan dengan aspek teknis yang tidak sederhana, mulai dari perlakuan pascapanen hingga pilihan sistem pertanian berkelanjutan.

Daya tarik sawit juga diperkuat oleh intervensi negara. Data berita lokal menyebutkan bahwa Bangka Tengah menjadi salah satu daerah yang aktif menjalankan PSR, dengan capaian 479,9 hektare kebun sawit warga yang masuk program sejak 2020 dan target peremajaan 150 hektare pada 2023 (Ahmadi, 2022). Di Desa Celuak, panen perdana PSR pada 2023 menjadi simbol keberhasilan program karena petani memperoleh hibah, dukungan teknis, serta bantuan jalan produksi (Rizal, 2023). Dukungan semacam ini memperkuat legitimasi sawit sebagai komoditas masa depan desa.

Namun, rasionalitas ekonomi petani tidak boleh dibaca sebagai pilihan bebas yang sepenuhnya netral. Pilihan terhadap sawit dibentuk oleh kondisi pasar lada, biaya produksi, kebijakan pemerintah, ketersediaan program, dan jaringan pembelian TBS. Ketika negara lebih banyak memberi fasilitas kepada sawit, maka sawit memperoleh keunggulan kelembagaan dibandingkan komoditas lain. Ahmadi (2023) mencatat bahwa pemerintah tetap mendorong budidaya lada, tetapi dukungan terhadap sawit melalui PSR terlihat lebih konkret dalam bentuk pembiayaan, rekomendasi teknis, bibit, dan jalan produksi. Perbedaan bentuk dukungan ini memengaruhi arah keputusan petani.

Selain itu, fluktuasi harga tidak hanya melekat pada lada, tetapi juga pada sawit. Data harga TBS di Bangka Belitung pada 2026 menunjukkan bahwa nilai sawit tetap bergantung pada mekanisme pasar dan keputusan penetapan harga daerah (Rusaidah, 2026). Perbedaannya, risiko harga pada pemilik kebun dan buruh tidak bekerja secara sama. Pemilik kebun menghadapi perubahan pendapatan dari TBS, sedangkan buruh menghadapi kemungkinan pengurangan hari kerja atau penundaan pembayaran ketika pemilik kebun menekan biaya produksi. Dengan demikian, stabilitas sawit bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh posisi agraria setiap warga.

Pada tingkat rumah tangga, sawit menjadi aset produktif ketika warga memiliki lahan. Tanaman sawit yang sudah menghasilkan TBS dapat memberi pendapatan berkala. Rumah tangga pemilik lahan memperoleh manfaat dari panen, memiliki posisi dalam kelompok tani, dan lebih mudah berhubungan dengan aktor pembeli. Sebaliknya, rumah tangga tanpa lahan

tidak memiliki tanaman yang dapat menghasilkan nilai. Mereka tetap terhubung dengan ekonomi sawit, tetapi bukan sebagai produsen. Posisi ini menjadi dasar terbentuknya perbedaan kelas agraria di Desa Celuak.

B. Akses Lahan sebagai Dasar Diferensiasi Agraria

Akses lahan merupakan faktor paling menentukan dalam struktur ekonomi sawit Desa Celuak. Warga yang memiliki lahan dapat mengubah sawit menjadi aset produksi. Mereka menanam, merawat, memanen, dan menjual TBS. Semakin luas dan produktif lahan, semakin besar peluang akumulasi pendapatan. Warga yang memiliki lahan juga lebih mudah memenuhi syarat administratif untuk program pemerintah karena program pertanian umumnya membutuhkan bukti penguasaan lahan, keanggotaan kelompok, dan kemampuan mengikuti mekanisme kelembagaan.

Warga tanpa lahan berada pada jalur ekonomi yang berbeda. Mereka tidak dapat memanfaatkan sawit sebagai aset karena tidak memiliki kebun. Mereka juga tidak memperoleh manfaat langsung dari peningkatan harga TBS, produktivitas tanaman, atau bantuan bibit. Jika sawit menghasilkan keuntungan, keuntungan itu masuk terlebih dahulu kepada pemilik kebun. Warga tanpa lahan hanya memperoleh pendapatan ketika pemilik kebun membutuhkan tenaga kerja. Perbedaan tersebut sejalan dengan pertanyaan Bernstein (2010) tentang siapa memiliki apa dan siapa memperoleh apa.

Diferensiasi agraria di Desa Celuak tidak selalu tampak sebagai konflik terbuka. Ketimpangan muncul melalui pembedaan akses yang terlihat wajar: sebagian warga memiliki kebun, sebagian lain bekerja di kebun tersebut. Pola ini dapat dianggap normal dalam kehidupan pedesaan, tetapi secara struktural membentuk hierarki. Pemilik lahan menguasai alat produksi, sedangkan buruh sawit hanya memiliki tenaga kerja. Pemilik kebun dapat menunda panen, memilih pekerja, menentukan upah, dan mengatur pembagian kerja. Buruh sawit tidak memiliki kontrol serupa.

Literatur sawit memperlihatkan bahwa petani kecil bukan kelompok yang seragam. Anas et al. (2025) menegaskan bahwa perbedaan aset dan kelembagaan menghasilkan hasil penghidupan yang berlainan antarpetani sawit. Temuan itu dapat diterapkan untuk membaca Desa Celuak: warga yang disebut petani sawit dapat terdiri atas pemilik lahan yang relatif kuat, pemilik lahan sempit yang rentan, dan warga yang hanya bekerja sebagai buruh. Kategori “masyarakat petani” perlu diurai agar tidak menutupi perbedaan posisi sosial di dalam desa.

Tabel 1. Diferensiasi Posisi Warga Dalam Ekonomi Sawit Desa Celuak

Kelompok Aktor	Akses Utama	Sumber Pendapatan	Implikasi Agraria
Pemilik lahan sawit	Lahan, bibit, modal, kelompok tani, akses TBS	Hasil panen dan nilai aset kebun	Memiliki posisi produksi lebih kuat dan lebih mudah mengakses program.

Pemilik lahan sempit	Lahan terbatas dan modal terbatas	Hasil panen kecil serta pekerjaan tambahan	Rentan terhadap biaya perawatan dan fluktuasi harga.
Warga tanpa lahan	Tenaga kerja dan jaringan sosial kerja	Upah harian atau borongan	Bergantung pada pemilik kebun serta memiliki posisi tawar lebih lemah.

Sumber: Diolah dari temuan lapangan dan kerangka politik ekonomi agraria Bernstein (2010), Li (2015), Cramb dan McCarthy (2016), serta data PSR Bangka Tengah (Ahmadi, 2022; Rizal, 2023).

C. Kerja Upahan dan Proletarisasi Pedesaan

Kerja upahan menjadi pintu masuk utama bagi warga yang tidak memiliki lahan sawit. Pekerjaan yang tersedia meliputi pembersihan kebun, pemupukan, penyemprotan gulma, pemanenan, pengangkutan TBS, pemeliharaan jalan kebun, dan pekerjaan teknis lain. Pekerjaan tersebut menghubungkan warga tanpa lahan dengan ekonomi sawit, tetapi hubungan itu berlangsung melalui penjualan tenaga kerja, bukan melalui kepemilikan aset. Di tingkat permukaan, kerja upahan dapat dibaca sebagai peluang karena menyediakan pendapatan tunai. Sawit membutuhkan tenaga kerja pada fase perawatan dan panen, sehingga warga yang tidak memiliki kebun masih dapat memperoleh penghasilan. Krishna dan Kubitza (2021) mencatat bahwa sawit dapat menciptakan pekerjaan dan memberi dampak ekonomi tertentu bagi wilayah pedesaan. Akan tetapi, peluang kerja tidak sama dengan distribusi nilai produksi. Buruh memperoleh upah atas jam kerja atau jenis pekerjaan tertentu, sedangkan pemilik kebun memperoleh nilai dari panen dan kenaikan aset kebun.

Perbedaan sumber pendapatan tersebut menunjukkan proses proletarisasi pedesaan. Proletarisasi terjadi ketika sebagian warga tidak lagi mengakses penghidupan melalui kepemilikan atau penguasaan lahan, tetapi melalui penjualan tenaga kerja (Bernstein, 2010). Pada Desa Celuak, warga tanpa lahan tidak sepenuhnya keluar dari sektor pertanian. Mereka tetap berada di dalam ekonomi sawit, tetapi posisinya berubah menjadi pekerja. Mereka bekerja di ruang agraris yang sama, namun tidak menguasai alat produksi yang menentukan distribusi keuntungan. Ketergantungan pada upah membuat posisi warga tanpa lahan rentan. Pendapatan mereka bergantung pada luas kebun milik orang lain, intensitas panen, kebutuhan pemilik kebun, musim kerja, dan kesediaan pemilik membayar upah. Ketika harga TBS naik, pemilik kebun berpotensi memperoleh peningkatan pendapatan.

Buruh tidak otomatis memperoleh kenaikan upah yang sebanding. Ketika harga TBS turun, pemilik kebun dapat mengurangi biaya tenaga kerja. Dengan demikian, buruh menanggung ketidakpastian dari dua arah: ketidakpastian kesempatan kerja dan ketidakpastian besaran upah. Li (2015) mengingatkan bahwa dampak sosial sawit sering terlihat pada perubahan akses terhadap sumber penghidupan. Warga yang tidak masuk

sebagai pemilik kebun dapat terdorong ke pekerjaan berupah dengan posisi tawar rendah. Pola ini tampak pada Desa Celuak karena warga tanpa lahan tetap dibutuhkan oleh ekonomi sawit, tetapi tidak memiliki kontrol terhadap harga, pasar, program, dan keputusan produksi. Buruh menjadi bagian penting dari sistem, namun nilai kerja mereka tidak memberi mereka kendali atas sistem tersebut.

D. Negara, Kelompok Tani, dan Perusahaan sebagai Pengatur Akses

Sawit di Desa Celuak tidak berkembang melalui relasi petani dan tanaman saja. Ada peran negara, kelompok tani, perusahaan mitra, pengepul, dan pembeli TBS. Pemerintah daerah menghadirkan program, legitimasi, dan infrastruktur. Kelompok tani menjadi saluran administrasi dan koordinasi. Perusahaan atau pembeli menyediakan jalur pasar. Ketiga unsur tersebut membentuk struktur akses yang menentukan siapa dapat masuk sebagai petani sawit dan siapa hanya menjadi pekerja. PSR memperlihatkan bentuk intervensi negara yang konkret. Di Bangka Tengah, program ini mencakup peremajaan tanaman, penggunaan bibit unggul, pembinaan pekebun, dan dukungan pembiayaan (Ahmadi, 2022). Pada Celuak, panen perdana sawit PSR disertai pembagian rekomendasi teknis, STDB, bantuan jalan produksi, dan pestisida (Rizal, 2023). Secara ekonomi, dukungan tersebut dapat meningkatkan produktivitas. Secara politik agraria, dukungan tersebut juga memperkuat posisi warga yang sudah memiliki lahan dan dapat masuk ke dalam mekanisme program.

Kelompok tani memiliki posisi ganda. Di satu sisi, kelompok tani memudahkan penyuluhan, distribusi bantuan, pendataan, dan hubungan dengan pemerintah. Di sisi lain, kelompok tani dapat menjadi pintu seleksi karena tidak semua warga memiliki posisi yang sama di dalamnya. Warga tanpa lahan atau warga yang tidak memiliki dokumen lahan cenderung tidak memperoleh manfaat langsung dari program berbasis kebun. Mereka dapat hadir sebagai tenaga kerja, tetapi tidak sebagai penerima utama bantuan. Perusahaan dan pembeli TBS juga memiliki pengaruh penting. Mereka menentukan standar pembelian, jalur penjualan, dan kepastian pasar. Cramb dan McCarthy (2016) menyebut relasi petani kecil, agribisnis, dan negara sebagai ciri utama kompleks sawit. Di Desa Celuak, kompleks tersebut tampak melalui hubungan antara petani pemilik kebun, kelompok tani, pemerintah, dan jaringan pembelian TBS. Kepastian pasar memberi insentif bagi petani, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada aktor yang menguasai akses pembelian. Pengalaman program pemberdayaan petani sawit rakyat di Kabupaten Bangka menunjukkan bahwa pendampingan teknis dan kemitraan dapat meningkatkan kapasitas kelompok tani (Wati et al., 2020). Meski demikian, dampak positif program perlu dilihat secara bertingkat. Program dapat berhasil bagi petani yang memenuhi syarat, tetapi belum tentu menjawab masalah warga yang tidak memiliki lahan. Karena itu, evaluasi kebijakan sawit tidak cukup mengukur produktivitas dan panen. Evaluasi juga perlu melihat distribusi manfaat antarposisi sosial di desa.

E. Perubahan Relasi Sosial dan Komersialisasi Kerja Desa

Perkembangan sawit mengubah pola kerja masyarakat Desa Celuak. Pada pertanian keluarga, pekerjaan kebun sering dilakukan oleh anggota rumah tangga atau melalui bantuan sosial antarwarga. Pada kebun sawit yang lebih luas dan berorientasi pasar, pekerjaan lebih sering diatur melalui mekanisme upah. Relasi gotong royong tidak hilang

sepenuhnya, tetapi logika ekonomi berubah menjadi lebih dominan ketika pekerjaan kebun berkaitan langsung dengan produksi TBS. Komersialisasi kerja ini menimbulkan perubahan dalam hubungan antarwarga. Pemilik kebun menjadi pemberi kerja, sedangkan warga tanpa lahan menjadi pekerja. Relasi sosial yang sebelumnya lebih cair dapat berubah menjadi relasi ekonomi yang dihitung berdasarkan waktu kerja, jenis pekerjaan, dan besaran upah. Perubahan ini tidak selalu menciptakan konflik, tetapi membentuk jarak sosial baru karena status ekonomi warga semakin ditentukan oleh kepemilikan kebun sawit.

Dampak sosial sawit juga tampak pada pembentukan simbol status. Kebun sawit produktif menjadi penanda kemampuan ekonomi rumah tangga. Pemilik kebun dapat memperoleh pendapatan berkala, memperluas kebun, membeli alat produksi, atau memperbaiki konsumsi rumah tangga. Warga tanpa lahan tidak memiliki aset serupa. Mereka memperoleh uang dari kerja, tetapi tidak memperoleh aset yang menghasilkan pendapatan pasif. Perbedaan ini membuat ketimpangan bergerak dari pendapatan harian menuju struktur aset jangka panjang. Studi Dharmawan et al. (2020) tentang ekspansi sawit di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa sawit mengubah organisasi produksi dan struktur pendapatan rumah tangga. Pola serupa terlihat pada Celuak, meskipun skala dan sejarah lokalnya berbeda. Sawit tidak hanya menambah sumber pendapatan, tetapi juga mengatur ulang siapa bekerja untuk siapa, siapa menguasai aset, dan siapa tergantung pada kesempatan kerja dari pihak lain. Perubahan tersebut harus dibaca secara hati-hati. Sawit tidak dapat dinilai hanya sebagai komoditas buruk atau baik. Bagi pemilik lahan, sawit dapat menjadi instrumen perbaikan ekonomi. Bagi buruh, sawit dapat menyediakan pekerjaan tunai. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa manfaat sawit dibedakan oleh posisi agraria. Kebijakan yang hanya menonjolkan peningkatan produksi akan gagal membaca kelompok yang bekerja di balik produktivitas tersebut.

F. Sawit sebagai Peluang, Ketimpangan, dan Arena Kekuasaan Agraria

Sintesis temuan menunjukkan bahwa sawit di Desa Celuak memiliki tiga wajah. Pertama, sawit merupakan peluang ekonomi bagi warga yang memiliki lahan dan dapat mengakses program. Mereka memperoleh pendapatan dari TBS, terlibat dalam kelompok tani, dan mendapat dukungan kelembagaan. Kedua, sawit merupakan sumber kerja bagi warga tanpa lahan. Mereka memperoleh upah dari pekerjaan kebun, tetapi tidak menguasai aset produksi. Ketiga, sawit merupakan arena kekuasaan karena akses terhadap manfaat ditentukan oleh hubungan antara lahan, modal, negara, kelompok tani, dan pasar. Perbedaan akses tersebut menjelaskan mengapa narasi sawit sebagai komoditas yang menguntungkan perlu dikritisi. Keuntungan sawit bukan kategori tunggal. Ada keuntungan pemilik lahan, keuntungan kelompok tani, keuntungan pembeli, dan upah buruh. Setiap kategori memiliki posisi dan risiko berbeda. Pemilik lahan menanggung biaya perawatan dan risiko harga, tetapi juga memiliki peluang akumulasi aset. Buruh menanggung risiko kerja tidak tetap dan posisi tawar rendah, tetapi tidak memperoleh bagian dari surplus aset.

Kerangka Bernstein (2010) membantu merumuskan temuan utama artikel ini. Siapa memiliki apa? Pemilik lahan memiliki kebun, sedangkan buruh memiliki tenaga kerja. Siapa melakukan apa? Pemilik kebun mengatur produksi, buruh mengerjakan pekerjaan fisik. Siapa memperoleh apa? Pemilik kebun memperoleh hasil TBS dan nilai aset, buruh memperoleh upah. Apa yang dilakukan dengan hasil tersebut? Pemilik kebun dapat

melakukan akumulasi atau perawatan kebun, sedangkan buruh menggunakan upah untuk konsumsi harian. Perbedaan jawaban atas empat pertanyaan tersebut menunjukkan diferensiasi agraria yang nyata. Temuan ini juga memperluas pembacaan atas program sawit rakyat. PSR dapat meningkatkan produktivitas dan memberi manfaat bagi petani pemilik lahan, sebagaimana ditunjukkan oleh data Bangka Tengah dan panen perdana Celuak (Ahmadi, 2022; Rizal, 2023). Akan tetapi, keberhasilan program perlu dilengkapi dengan perlindungan buruh kebun, mekanisme upah layak, akses warga tanpa lahan terhadap sumber penghidupan, dan diversifikasi ekonomi desa. Tanpa instrumen tersebut, sawit dapat memperkuat ketimpangan yang tersembunyi di balik capaian produksi.

Kontribusi artikel ini terletak pada pergeseran fokus dari “mengapa warga memilih sawit” menuju “bagaimana sawit membedakan posisi warga”. Pergeseran tersebut penting karena banyak pembahasan sawit berhenti pada produktivitas dan pendapatan petani. Penelitian ini menunjukkan bahwa petani bukan kategori homogen. Ada pemilik kebun, petani kecil, buruh sawit, dan warga tanpa akses lahan. Setiap kelompok menghadapi risiko dan peluang yang berbeda. Oleh karena itu, kebijakan sawit yang adil harus berbasis pada peta posisi sosial, bukan hanya pada angka panen saja.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pada perkebunan sawit pada Desa Celuak telah menciptakan diferensiasi agraria yang didasari akses pada lahan, modal, dan kesempatan ekonomi. Pemilik lahan memperoleh manfaat yang lebih besar melalui kepemilikan kebun dan akses akan program pendukung, sedangkan warga yang tidak memiliki lahan sangat bergantung pada kerja buruh upahan dengan posisi ekonomi yang cenderung yang lebih rentan. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pemerintah daerah seharusnya perlu untuk memperluas akses akan ekonomi bagi para warga tanpa lahan, meningkatkan perlindungan terhadap buruh kebun, serta mendorong usaha desa agar manfaat ekonomi sawit pada daerah tersebut dapat dirasakan secara lebih merata dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Untuk bagian ini peneliti berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan artikel jurnal ini dalam rangka pemenuhan tugas kuliah. Peneliti juga berterima kasih atas kontribusi para penulis lainnya yang ikut membantu dalam merumuskan, menyusun dan menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi. (2022, December 29). Bangka Tengah Remajakan 150 Hektare Sawit Pada 2023. *AntaraneWS bangkabelitung*. <https://Babel.AntaraneWS.Com/Berita/326928/Bangka-Tengah-Remajakan-150-Hektare-Sawit-Pada-2023>
- Ahmadi. (2023). Bangka Tengah Mendorong Petani Terus Membudidayakan Tanaman Lada. *ANTARA News*. <https://Www.AntaraneWS.Com/Berita/3427365/Bangka-Tengah-Mendorong-Petani-Terus-Membudidayakan-Tanaman-Lada>

- Anas, K., Naping, H., Salman, D., & Tenriawaru, A. N. (2025). Differences In Assets, Strategies, And Livelihood Outcomes Among Oil Palm Smallholder Typologies In West Sulawesi, Indonesia. *Sustainability*, 17(13), 6064. <https://doi.org/10.3390/Su17136064>
- Ariyanto, K. (2022). Intervensi Pemerintah Desa Dalam Program Pembangunan Pertanian: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik Di Konteks UU Desa 2014. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 3(2), 164-180.
- Aulia, A. D., & Kurniati, E. (2024). Penerapan Prinsip Ekonomi Dalam Penentuan Harga Jual Lada Dan Dampaknya Terhadap Keuntungan Petani Di Lampung Selatan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 1(2), 58-70.
- Bernstein, H. (2010). *Class Dynamics Of Agrarian Change*. Fernwood Publishing.
- Cramb, R., & McCarthy, J. F. (Eds.). (2016). *The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness And The State In Indonesia And Malaysia*. NUS Press.
- Dharmawan, A. H., Mardiyarningsih, D. I., Komarudin, H., Ghazoul, J., Pacheco, P., & Rahmadian, F. (2020). Dynamics Of Rural Economy: A Socio-Economic Understanding Of Oil Palm Expansion And Landscape Changes In East Kalimantan, Indonesia. *Land*, 9(7), 213. <https://doi.org/10.3390/Land9070213>
- Diskominfosta. (2020). Desa Celuak. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. <https://bangkatengahkab.go.id/halaman/detail/desa-celuak>
- Kamila, K., Kusmiadi, R., & Aini, S. N. (2019). Pengaruh Penundaan Waktu Perendaman Dan Pelukaan Mekanis Terhadap Kualitas Lada Putih Muntok. *Jurnal Bioindustri*, 1(2), 213-228.
- Krishna, V. V., & Kubitz, C. (2021). Impact Of Oil Palm Expansion On The Provision Of Private And Community Goods In Rural Indonesia. *Ecological Economics*, 179, 106829. <https://doi.org/10.1016/J.Ecolecon.2020.106829>
- Li, T. M. (2015). Social Impacts Of Oil Palm In Indonesia: A Gendered Perspective From West Kalimantan. *CIFOR Occasional Paper*. Center For International Forestry Research.
- Maryadi, A. S., & Agusta, I. (2016). Analisis Usaha Tani Lada Dan Arah Pengembangan Di Kabupaten Bangka Tengah. *Tata Loka*, 18(2), 78-84.
- Paramitha, A. P., Mustikarini, E. D., & Khodijah, N. S. (2023). Studi Keputusan Petani Lada Putih Terhadap Penggunaan Junjung Hidup Dalam Sistem Pertanian Berkelanjutan. *Enviagro: Jurnal Pertanian Dan Lingkungan*, 9(1), 7-16.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Rizal. (2023, December 1). Sawit PSR Di Simpang Katis Panen Perdana Di Usia Tanam 32 Bulan, Segini Hasilnya. *Elaeis.Co*. <https://elaeis.co/berita/baca/sawit-psr-di-simpang-katis-panen-perdana-di-usia-tanam-32-bulan-segini-hasilnya>
- Rusaidah. (2026). Daftar Resmi Harga TBS Sawit Terbaru 1-15 April 2026 Di Bangka Belitung. *BangkaPos.Com*. <https://bangka.tribunnews.com/>
- Satriawan, I. (2015). Harga Lada Tembus Rp170 Ribu Per Kilogram. *Bangka.Com*.
- Septi. (2026). Harga Lada Putih Babel Januari 2026 Di Tingkat Petani Dan Pasar Daring. *Babelpos.Id*. <https://babelpos.id/>

Wati, S. S., Agustina, F., & Evahelda. (2020). Socio-Economic Impact Of Oil Palm Smallholder's Empowerment Program In Bangka Regency: Dampak Sosial Ekonomi Program Pemberdayaan Petani Kebun Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Bangka. *Journal Of Integrated Agribusiness*, 2(1), 1-19.
<https://doi.org/10.33019/Jia.V2i1.1121>